



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# KINERJA 2024 DITJEN PSDKP

“Garda Terdepan dalam Mengawal Ekonomi Biru”



# Sekapur Sirih



*Assalamuallaikum Wr. Wb.*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Tahun 2024 ini dapat disusun dan disajikan.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam mengawal ekonomi biru, Ditjen PSDKP terus berkomitmen dalam menjalankan tugas pengawasan serta penegakan hukum guna memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai strategi dan inovasi, Ditjen PSDKP telah mengambil langkah-langkah nyata dalam mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta refleksi atas capaian, tantangan, dan langkah-langkah strategis yang telah diambil sepanjang tahun 2024. Harapannya, laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas Ditjen PSDKP. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi landasan bagi langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

**Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM**  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

# Daftar Isi

- 1** Portofolio
- 2** Capaian Utama
- 3** Penanganan Pelanggaran
- 4** Usulan Kelembagaan
- 5** Kerja Sama
- 6** Keuangan dan PNBP
- 7** Prestasi

**1**

# Portofolio PSDKP



## Kebijakan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menjaga keseimbangan antara aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan interaksi kedua aspek tersebut akan berbuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan menjaga kesehatan laut, kebijakan strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru KKP. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui:

- 1 Operasi pengawasan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan baik di darat/pelabuhan dan laut
- 2 Penyadartahuan/Sosialisasi
- 3 Kolaborasi/Sinergi operasi dengan instansi terkait dan Pemerintah daerah
- 4 Penegakkan Hukum
- 5 Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good government*)

# Profil Pejabat Ditjen PSDKP

**Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi, M.H**  
Direktur Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan

**Ir. Suharta, M.Si**  
Sekretaris Dirjen PSDKP

**Saiful Umam, S.St.Pi, MM**  
Direktur Pengendalian  
Operasi Armada

**Drs. Halid K. Jusuf, MPA**  
Direktur Pengawasan  
Sumber Daya Perikanan

**Teuku Elvitrasyah, SH, MM**  
Direktur Penanganan  
Pelanggaran

**Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM**  
Dirjen PSDKP



# Sebaran UPT dan Satwas PSDKP



● 14 UPT

● 58 Satwas

# Keragaan SDM Aparatur Ditjen PSDKP

1493  
Orang

 **Eselon I**  
1 Orang

 **Eselon II**  
5 Orang

 **Eselon III**  
6 Orang (UPT)

 **Eselon IV**  
14 Orang (UPT)

 **Eselon V**  
8 Orang (UPT)

 **Fungsional  
Tertentu**  
656 Orang

 **Fungsional  
Umum**  
857 Orang

- Pengawas Perikanan
- Pranata Keuangan SDMA
- Analis Keuangan APBN
- Analis Kepegawaian
- Perencana
- Analis Hukum
- Arsiparis

- Analis SDMA
- Pranata Komputer
- Analis Kebijakan
- Pranata Humas
- Pranata SDMA
- Penerjemah
- Statisi

- Awak Kapal Pengawas
- Staf Pelaksana

## KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan



**352**  
Orang

*Pasal 66 (2) UU Perikanan*

### PENGAWAS PERIKANAN

Mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan



**204**  
Orang

*Pasal 36 (2) UU PWP3K*

### PENGAWAS KELAUTAN

Melakukan pengawasan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



**505**  
Orang

*Pasal 68 (1) UU Perikanan*

### AWAK KAPAL PENGAWAS

Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan



**270**  
Orang

*Pasal 66 A UU Perikanan*

### PENYIDIK PNS PERIKANAN

Melakukan penyidikan di bidang perikanan

## TUGAS DAN FUNGSI

Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi



Pengawasan  
tata ruang laut



Pengawasan  
Perlindungan  
Lingkungan



Pengawasan  
Penangkapan  
Ikan



Pengawasan  
Budidaya



Pengawasan  
Daya Saing  
Produk



Operasi Kapal  
Pengawas dan  
Udara



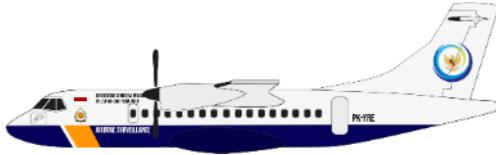
Pengelolaan  
Sarana  
Pengawasan



Penegakan  
Hukum di  
Sektor Kelautan  
dan Perikanan

# Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP

**2**  
Unit



## **Pesawat Patroli**

Pesawat ini berfungsi untuk memantau aktivitas di laut, mendeteksi pelanggaran, serta mendukung operasi penegakan hukum di perairan

**91**  
Unit



## **Speedboat dan URC (Unit Reaksi Cepat)**

Mobilitas cepat dalam pengawasan dan penindakan menjangkau wilayah yang sulit diakses oleh kapal besar dan merespons cepat

**34**  
Unit



## **Armada Kapal Pengawas**

Ditjen PSDKP mengoperasikan 34 unit kapal pengawas yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari Kelas I hingga Kelas V. Kapal-kapal ini digunakan dalam berbagai operasi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia

# Prasarana Pengawasan

## Ditjen PSDKP

### **PUSDAL dan ZMC PSDKP**

Berperan dalam pemantauan dan pengendalian operasi pengawasan secara real-time serta mengintegrasikan data dan informasi agar pengawasan lebih efektif



### **Pangkalan dan Stasiun PSDKP**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PSDKP. Klasifikasinya didasarkan pada analisis beban kerja yang disesuaikan dengan lokasi, satuan pengawasan, dan wilayah kerja



# Sebaran Kapal Pengawas

ZONA V (WPPNRI 571 Selat Malaka)

## 5 Kapal Pengawas

HIU MACAN TUTUL 02, HIU 01,  
HIU 08, HIU 12, HIU 16

Kelas I: 1 Kapal  
Kelas III: 2 Kapal  
Kelas IV: 3 Kapal

ZONA I (WPPNRI 711 Selat Karimata,  
Laut Natuna, Laut Natuna Utara)

## 8 Kapal Pengawas

ORCA 02, ORCA 03, BARAKUDA 01, HIU MACAN  
05, HIU MACAN 01, HIU 17, HIU 03, HIU 11

Kelas I: 3 Kapal  
Kelas II: 4 Kapal  
Kelas III: 3 Kapal  
Kelas IV: 3 Kapal

ZONA II ( WPPNRI 716 Laut Sulawesi dan  
WPPNRI 717 Samudera Pasifik )

## 5 Kapal Pengawas

ORCA 06, HIU MACAN TUTUL 01,  
HIU 15, HIU 05, HIU MACAN 04

Kelas I : 4 Kapal  
Kelas II: 2 Kapal  
Kelas III: 4 Kapal

ZONA IV ( WPPNRI 572 Samudera  
Hindia, WPPNRI 573 Samudera  
Hindia, Laut Sawu, Laut Timor

## 2 Kapal Pengawas

ORCA 05, HIU MACAN 03

Kebutuhan Ideal: 13 kapal  
Kelas I: 3 Kapal  
Kelas II: 10 Kapal  
Kekurangan: 10 Kapal

ZONA VI (WPPNRI 712 Laut Jawa  
WPPNRI 713 Selat Makassar, Laut  
Flores, Laut Bali, Teluk Bone)

## 8 Kapal Pengawas

ORCA 01, AKAR BAHAR, PAUS 01, HIU 10,  
HIU 06, HIU 04, HIU 09, HIU 07

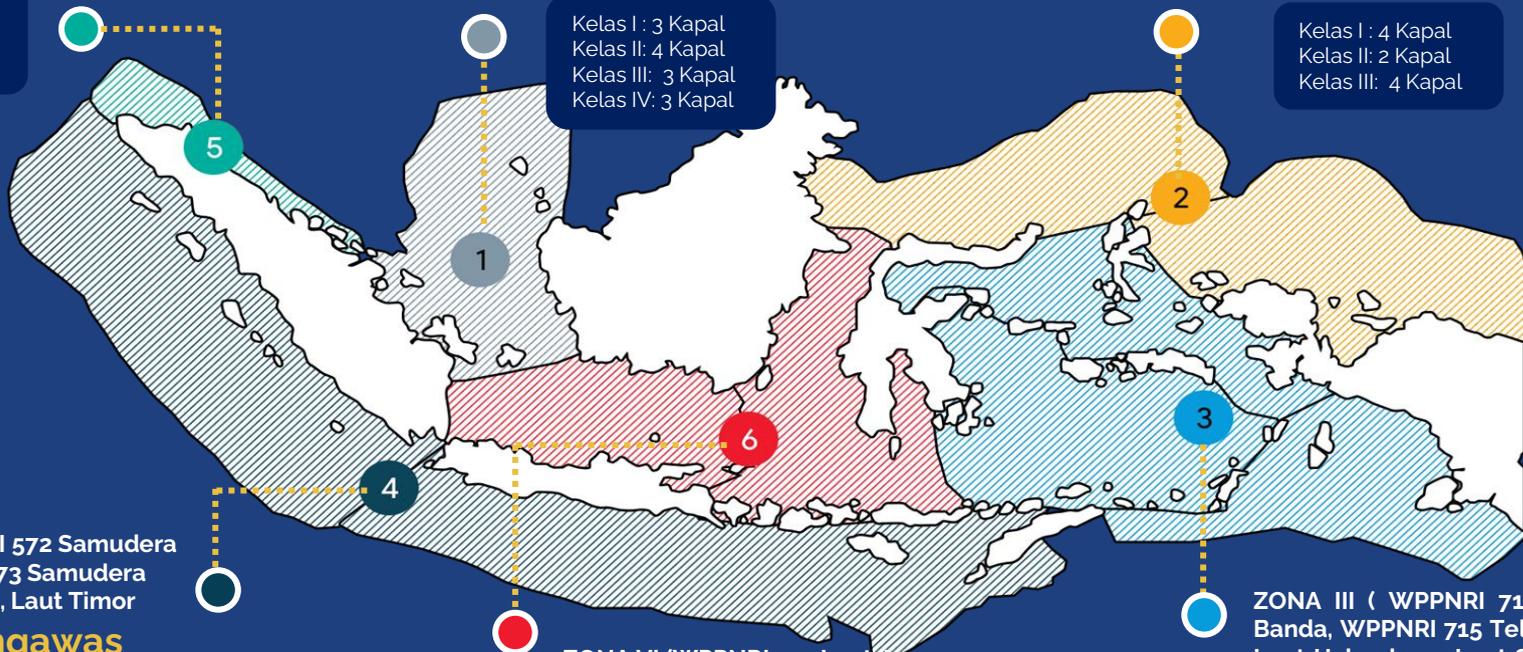
Kelas III: 5 Kapal  
Kelas IV: 8 Kapal

ZONA III ( WPPNRI 714 Teluk Tolo dan Laut  
Banda, WPPNRI 715 Teluk Tomini, Laut Maluku,  
Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau,  
WPPNRI 718 Laut Aru dan Laut Arafuru

## 6 Kapal Pengawas

ORCA 01, BARAKUDA 02,, HIU 02, HIU 13,  
HIU MACAN 06, HIU 14

Kelas I : 3 Kapal  
Kelas II: 4 Kapal  
Kelas III: 7 Kapal  
Kelas IV: 1 Kapal



# Kapal Pengawas Ditjen PSDKP

## 34 Unit

**6**  
Unit  
Kelas I



- ✓ KP Orca 1
- ✓ KP Orca 2
- ✓ KP Orca 3
- ✓ KP Orca 4
- ✓ KP Orca 5
- ✓ KP Orca 6

*Panjang > 50 Meter*

**5**  
Unit  
Kelas II



- ✓ KP Hiu Macan Tutul 01
- ✓ KP Hiu Macan Tutul 02
- ✓ KP Paus 01
- ✓ KP Baracuda 1
- ✓ KP Baracuda 2

*Panjang 40 - 50 Meter*

**12**  
Unit  
Kelas III



- ✓ KP Hiu 11
- ✓ KP Hiu 12
- ✓ KP Hiu 13
- ✓ KP Hiu 14
- ✓ KP Hiu 15
- ✓ KP Hiu 16
- ✓ KP Hiu 17
- ✓ KP Hiu Macan 001
- ✓ KP Hiu Macan 002
- ✓ KP Hiu Macan 004
- ✓ KP Hiu Macan 005
- ✓ KP Hiu Macan 006

*Panjang 30 - 40 Meter*

**10**  
Unit  
Kelas IV



- ✓ KP Hiu 001
- ✓ KP Hiu 002
- ✓ KP Hiu 003
- ✓ KP Hiu 004
- ✓ KP Hiu 005
- ✓ KP Hiu 006
- ✓ KP Hiu 007
- ✓ KP Hiu 008
- ✓ KP Hiu 009
- ✓ KP Hiu 010

*Panjang 20 - 30 Meter*

**1**  
Unit  
Kelas V



- ✓ KP Akar Bahar 001

*Panjang 15 - 20 Meter*

# Senjata Api Ditjen PSDKP

Pistol P3A



75  
Unit

Senapan Semi Otomatis  
SS1 V5



75  
Unit

Senapan Semi Otomatis  
SS2 / SB2 V2



200  
Unit

Senapan Semi Otomatis  
PM1A2



167  
Unit

Senapan Mesin Kaliber  
12,7 mm SM 5



10  
Unit

2

## Capaian Utama Ditjen PSDKP

# EKONOMI BIRU **UNTUK** INDONESIA MAJU

## 25 Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKP Mengelola sektor kelautan dan perikanan sejak 26 Oktober 1999. Menjaga keberlanjutan sumber dayanya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bersama Kabinet Merah Putih, KKP siap berlayar bersama **Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.**



## 4 Arahkan MKP Kepada Ditjen PSDKP

*"PSDKP harus mampu menjaga dan mengawasi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan"*



Hentikan Penyelundupan BBL



Pemberantasan Illegal Fishing



Pengawasan PKKPR



Kawal Kesuksesan PIT



# 1

## Hentikan Penyelundupan BBL

Benih Bening Lobster (BBL) adalah tahap awal kehidupan lobster yang masih sangat kecil, yaitu saat lobster berada dalam fase larva yang transparan dan belum memiliki warna. Pada tahap ini, lobster belum dapat berkembang menjadi lobster dewasa yang siap dipanen. BBL biasanya dipanen dari alam atau dibudidayakan dalam keramba atau hatchery untuk dibesarkan hingga mencapai ukuran yang lebih besar.

### Pengawasan Penyelundupan

Benih bening lobster sangat bernilai karena bisa dibesarkan untuk menghasilkan lobster yang lebih besar, yang kemudian bisa dipasarkan untuk konsumsi atau diekspor. Potensi BBL sangat besar di Indonesia, terdapat sekitar 465.793.022 ekor BBL tersebar di 11 WPPNRI. Permintaan pasar internasional yang sangat tinggi, terutama untuk pasar negara-negara seperti Vietnam, China, dan negara-negara Asia lainnya menyebabkan adanya penyelundupan BBL.

Persoalan penyelundupan BBL menjadi tantangan dalam pengelolannya dimana diperlukan sinergi internal KKP untuk menjalankan dari hulu sampai dengan hilir, baik yang terkait dengan penangkapan, pengembangan budidaya, penguatan mutu, tata niaga sampai dengan pengawasan pengelolaan BBL.

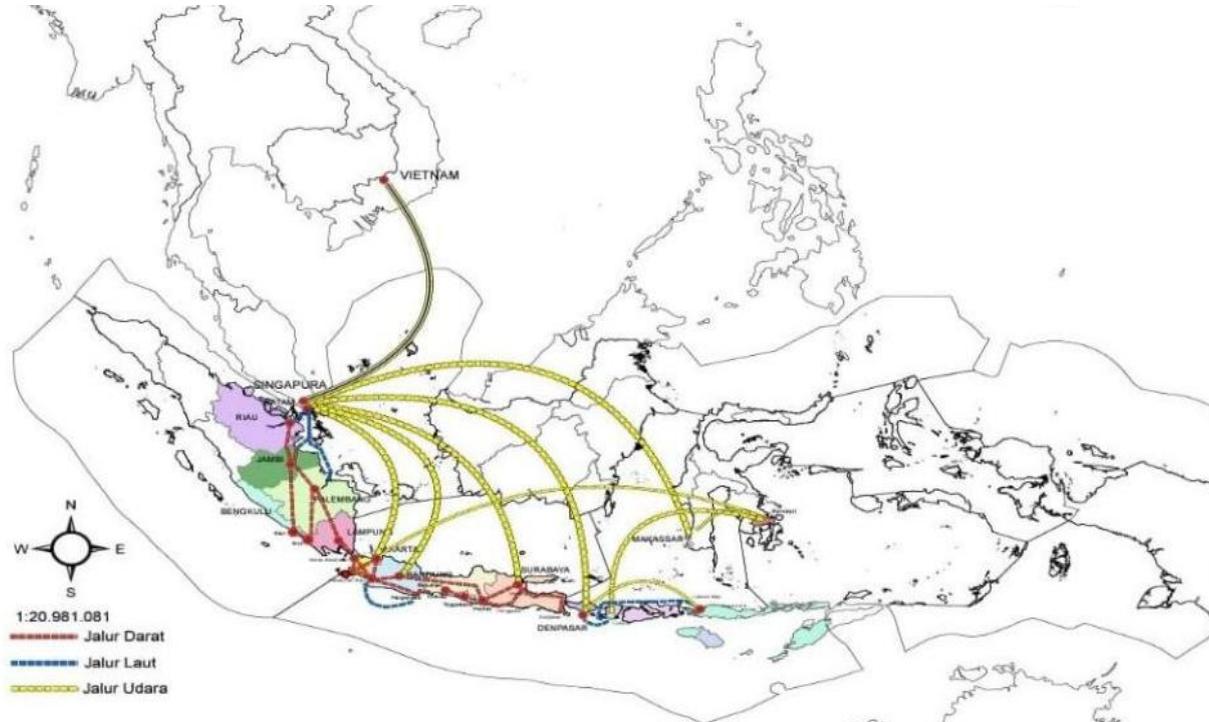


## Kebijakan KKP & Permen KP No 7 Tahun 2024

KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta membentuk Project Manajement Office-724 (PMO) KKP berisikan unit kerja internal terkait KKP, yang berperan dalam percepatan transformasi tata kelola lobster, termasuk Ditjen PSDKP. Dalam regulasi tersebut, Indonesia menetapkan kebijakan yang lebih ketat dalam hal pengelolaan dan distribusi lobster, dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan spesies ini dan mencegah kerugian besar akibat praktik ilegal. KKP, bersama dengan aparat penegak hukum seperti TNI AL, terus berupaya memerangi penyelundupan BBL yang merugikan negara dan lingkungan.



## Peta Jalur Distribusi BBL



Lokasi rawan penyelundupan BBL yaitu di pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan, pintu keluar bandara, dan jalur laut.

Adapun modus penyelundupan BBL yaitu melalui pengepul BBL, menggunakan mobil berganti-ganti, menggunakan koper melalui jalur udara, serta menggunakan kapal kecepatan tinggi/kapal hantu (200 PK).

## Hasil Operasi Penggagalan Penyelundupan BBL

Pada tahun 2024, Ditjen PSDKP bersama Aparat Penegak Hukum (APH) telah berhasil menggagalkan penyelundupan BBL sebanyak 44 kali di 16 lokasi berbeda. Dalam upaya tersebut, jumlah BBL yang berhasil diamankan mencapai 6.443.308 ekor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.849 Miliar. Penyelundupan tersebut berhasil digagalkan di beberapa lokasi seperti Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, dan Bali.

### Mei

#### 2 Mei 2024 Tanjung Jabung Timur, Jambi

- Penyelundupan BBL dalam 18 Boks dengan potensi kerugian 15 Miliar

#### 10 Mei 2024 Tanjung Jabung Timur, Jambi

- Penyelundupan BBL sebanyak 277.800 ekor

#### 13 Mei 2024 Kota, Jambi

- Penyelundupan BBL sebanyak 125.000 ekor dalam 17 Boks



### Juni

#### 12 Juni 2024 Cilacap, Jawa Tengah

- Penyelundupan BBL sebanyak 16.000 ekor dari seorang terdakwa (FAS) dengan menggunakan transportasi mobil dengan putusan 6 bulan penjara dan denda sebesar 10 Miliar



## Agustus

### 15 Agustus 2024 Binuangen, Banten

- Penyelundupan BBL sebanyak 20.000 ekor

### 15 Agustus 2024 Kebumen, Jawa Tengah

- Penyelundupan BBL sebanyak 800 ekor



## September

### 5 September 2024 Parung Panjang, Jawa Barat

- Penyelundupan BBL sebanyak 81.000 ekor

### 5 September 2024 I Gusti Ngurah Rai, Bali

- Penyelundupan diperkirakan mencapai Rp. 12,15 Miliar.



## Oktober

### 10 Oktober 2024 Batam, Kepulauan Riau

- Penyelundupan BBL sebanyak 88.200 ekor yang diperkirakan bernilai Rp. 13,2 Miliar.

Sebagian dari BBL yang berhasil diamankan kemudian dilepasliarkan dan Sebagian lainnya dibudidayakan.



## Desember

### 9 Desember 2024 Pesisir Barat, Lampung

- Penyelundupan BBL sebanyak 52.000 ekor, dengan potensi kerugian Rp. 7,8 Miliar.

Tim Buser Ditjen PSDKP Bersama TNI AL melakukan pelepasliaran BBL yang diamankan di Perairan Pantai Kelapa Kunjir



## 2 Pengawasan Illegal Fishing

Kapal pengawas kelautan dan perikanan berfungsi melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan di laut. Mekanisme pengawasan di laut menerapkan pengawasan terintegrasi (integrated surveillance system/ISS) melalui pengoptimalan pemanfaatan data dan informasi dari pusat pengendalian (command center), data radar satellite, Automatic Identification System (AIS) dan data intelijen.

Pada tahun 2024, Ditjen PSDKP telah melakukan operasi kapal pengawas sebanyak 67 hari operasi dan 191 hari operasi udara. Dari kegiatan tersebut, PSDKP berhasil melakukan pemeriksaan kepatuhan (compliance) kapal perikanan sebanyak 7.235 kapal dan menangkap sebanyak 250 kapal dengan rincian 30 kapal ikan asing dan 220 kapal ikan indonesia.

### Operasi Laut dan Udara



**67** Hari  
Operasi KP

**191** Hari  
Operasi Udara



Pemeriksaan  
**7.235**  
Kapal



Pemeriksaan  
**348**  
Obyek



Sebaran  
**11** WPPNRI

### Hasil Tangkapan

**250**  
Kapal  
Perikanan

30 KIA dan 220 KII

**28**  
Rumpon  
Illegal

**3**  
Obyek  
Kelautan

## Kerja Sama Patroli

Kerja sama operasi merupakan salah satu bentuk sinergitas antar instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. Kerja sama operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan dilakukan dengan wadah Kerjasama yaitu:

- 1) Patroli bersama, yaitu kerja sama yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia,
- 2) Patroli Gempur Narkotika Bersama (Purnama) yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antar K/L dalam memerangi masuknya narkotika melalui laut
- 3) Patroli bersama pengawasan dan penindakan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) melalui laut
- 4) Patroli terkoordinasi yaitu melalui patroli antar negara yaitu Australia-Indonesia (Ausindo) Gannet-7 dan Malaysia-Indonesia (Malindo).

## Patroli Bersama



**3** Patroli  
Terlaksana

**10** Unit Kapal  
Pengawas  
Terlibat

**323** Kapal  
Diperiksa  
Kepatuhannya

## Patroli Terkoordinasi Antar Negara



- **Gannet-8** **KP. Orca 05, KP. Hiu Macan 03 dan 1 pesawat ATR Air Surveillance**  
9 – 17 Mei 2024  
Pemeriksaan 14 Kapal Ikan Indonesia dan Pemulangan 36 Nelayan WNI



- **Jawline** **KP. Orca 05**  
19 – 26 Sep 2024  
Pemeriksaan 5 Kapal Ikan Indonesia dan Pemulangan 16 Nelayan WNI



- **Patkor Optima** **KP. Hiu 16**  
**Malindo 31 A 2024**  
9 – 17 Mei 2024  
Pemeriksaan 25 Kapal



## Dukungan Operasi SAR & Kemanusiaan

**4** Dukungan  
Operasi SAR

**1** Dukungan Operasi  
Kemanusiaan

## Hasil Tangkapan

Sepanjang tahun 2024, Ditjen PSDKP telah berhasil menangkap 250 kapal perikanan dengan rincian 30 kapal ikan asing dan 220 kapal ikan Indonesia. Dari capaian tersebut, valuasi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari aspek sosial ekonomi adalah sebesar 3,7 triliun rupiah. Nilai tersebut diperoleh dari nilai produksi perikanan, nilai PNPB dan pajak, tenaga kerja dan BBM kapal.

### 250 Kapal Tangkapan

	Indonesia	220
	Malaysia	7
	Vietnam	3
	Filipina	17
	Rusia	1
	Sierra Leone	2

 **3,7** Triliun

Valuasi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari aspek sosial ekonomi



**Produksi Perikanan**  
754,4 Milyar



**Tenaga Kerja**  
110,4 Milyar



**PNBP & Pajak**  
79,2 Milyar



**BBM Kapal**  
2,1 Triliun

## Kronologi Kasus Run Zeng 03

Pada tanggal 15 Mei 2024, Kapal Pengawas Hiu 01 melakukan operasi pengawasan di WPP-RI 718 (Perairan Laut Arafura), KP Paus 01 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap MV Rung Zeng 03 yang menggunakan bendera Rusia. Dari hasil pemeriksaan MV Rung Zeng 03 diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya kapal tersebut dikawal menuju Pangkalan PSDKP Tual.

Run Zeng 03 adalah kapal ikan dengan alat tangkap trawl dengan ukuran 870 GT, tidak terdaftar dan tidak memiliki izin beroperasi di Indonesia. Saat ditangkap, kapal tersebut diketahui membawa 12 awak kapal perikanan (AKP) warga negara Indonesia (WNI) dan 18 AKP warga negara asing (WNA). Selain itu, PSDKP KKP juga menemukan ikan campuran hasil tangkapan seberat 30 ton di palka. Berdasarkan interogasi awal oleh PSDKP terhadap AKP Run Zeng 03, kapal ini secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia sejak 12 Januari 2024.





Selain menangkap kapal Run Zeng 03, PSDKP juga mengamankan KM. Yulian (KM Y) dan KM. Mitra Utama Semesta (KM MUS) yang diduga turut membantu operasionalisasi MV Run Zeng 03. KM Y diduga membantu mendistribusikan logistik makanan dan BBM adapun KM MUS ditengarai melakukan alih muatan (transshipment) sebanyak 100 ton pada pertengahan April lalu.

Penangkapan kapal Run Zeng 03 tidak lepas dari kerja sama PSDKP yang berkoordinasi dengan dengan Australia Maritime Border Command (MBC) yang menginformasikan kapal Run Zeng sempat berada di ZEE Australia pada awal Mei 2024. Otoritas Australia juga memberikan informasi kepada PSDKP KKP begitu kapal Run Zeng terindikasi meninggalkan ZEE Australia dan menuju ZEE Indonesia.

## Putusan Pengadilan Kasus Run Zeng 03

Pada tanggal 22 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Tual memvonis nahkoda kapal KM Rung Zeng 03 atas nama Wang Zengjung dengan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar dan nahkoda KM Yulian atas nama Alwi dengan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Selain itu, kata Majelis Hakim PN Tual, barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Run Zeng 03 (GT.870) akan dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai kapal pengawas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP).



# 3

## Pengawasan PKKPRL

Pada tahun 2024, Ditjen PSDKP melakukan pengawasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) terhadap 169 kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dari capaian tersebut, kegiatan reklamasi dan terminal khusus menempati peringkat tertinggi dengan masing-masing sebanyak 66 dan 35 kegiatan.



**66**  
Reklamasi



**8**  
Pertambangan



**35**  
Terminal Khusus  
TUKS



**5**  
Pengerukan



**24**  
Pariwisata



**2**  
Pipa/Kabel



**11**  
Budidaya



**18**  
Lainnya

## Kasus PT. Lamongan Integrated Shorebase

Pada tanggal 18 April 2024, PT Lamongan Integrated Shorebase (LIS) diindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut dengan melakukan pengerukan pada area jetty dan kolam putar Terminal Umum Tanjung Pakis serta melakukan pembuangan material hasil pengerukan (dumping area).

Pada tanggal 26 April 2024, Kapal TSHD Sorong milik operasional PT LIS telah terpantau oleh Command Center KKP terpantau aktif melakukan kegiatan keruk di Perairan Kab. Lamongan untuk kegiatan pengerukan kolam pelabuhan dan dumping pada Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Integrated Shorebase di Tanjung Pakis Kab. Lamongan Jawa Timur. Kapal TSHD Sorong telah dihentikan sementara karena area keruk dan dumping belum memiliki KKPRL.

Berdasarkan analisis dokumen perizinan eksisting kegiatan kepelabuhanan PT LIS dan ketentuan pada UU 6 Tahun 2023, PP 21 Tahun 2021 dan Permen KP 28 Tahun 2021 terkait keberlakuan KKPRL, maka dipahami dan disepakati bahwa kegiatan pengerukan dan dumping yang dilakukan PT LIS seluruhnya terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban PKKPR.

PT LIS dikenakan kewajiban pembayaran denda administrasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut senilai Rp.892.483.140.



## Kasus PT. Maratua Island Diving

Pada tanggal 19 September 2024, Polsus PWP3K yang dipimpin langsung Dirjen PSDKP telah melakukan kegiatan Paksaan pemerintah/Penghentian sementara kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) pada PT. Maratua Island Diving/ Maratua Blue (PMA Malaysia).

PT. Maratua Island Diving/ Maratua Blue diindikasikan melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPR, melakukan kegiatan wisata tirta lainnya tanpa perizinan berusaha, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tanpa perizinan.

Akibat pelanggaran tersebut, Ditjen PSDKP menjatuhkan denda administratif sebesar Rp. 405.133.000 dan melakukan penyegelan terhadap PT Maratua Island Diving



## 4

Kawal  
Kesuksesan PIT

Dalam rangka akselerasi peningkatan PNBP pasca produksi, dilaksanakan operasi pengawasan secara khusus dengan melibatkan kapal pengawas melalui peningkatan fokus operasi di sektor prioritas dan super prioritas meliputi zona I, II, III, dan IV sejak 12 November 2024

17

Kapal  
Pengawas  
TerlibatOperasi Khusus Pengawasan PNBP  
SDA Perikanan Pasca ProduksiMemeriksa 747  
Kapal Perikanan

737 kapal penangkap  
dan 10 kapal angkut

Menangkap 46  
Kapal Pasca Produksi

29 kapal pasca produksi, 1  
kapal angkut, 15 kapal izin  
daerah, 3 kapal tidak  
memiliki dokumen

Memeriksa Volume  
Ikan di Palkah

Estimasi volume ikan  
dari kapal yang  
diperiksa 8.380 ton

Memeriksa Data Pengisian  
Log Book Kapal Perikanan

Mengisi logbook 312  
kapal (41%), tidak mengisi  
logbook 435 kapal (58%)

## Operasi Pengawasan SDKP Modeling PIT Zona 3



Zona 3 Monitoring  
Center di Pangkalan  
PSDKP Tual



Implementasi  
SOP Bersama  
DJPT & DJPSDKP

### Strategi Pengawasan di Lokasi Modeling PIT Zona 3



Before  
Fishing



While  
Fishing



During  
Landing



Pos  
Landing

### Teknologi Informasi Terintegrasi

- ✓ Vessel Traffic Center (VTC)
- ✓ Vessel Monitoring System (VMS)
- ✓ Automatic Identification System (AIS)
- ✓ War room kapal pengawas
- ✓ Sistem komunikasi

99

Kapal  
Terantau

543

Kapal  
Diperiksa

23

Kapal  
Ditangkap

378.778

Nautical Mile Luasan  
Area Pengawasan

## Pembangunan Zona Monitoring (ZMC) Zona 3 di Tual

Menteri Kelautan dan Perikanan menjadikan Kota Tual dan Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pelaksanaan modeling ini melibatkan 187 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura). Selain itu, pelaksanaan modeling PIT juga menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.



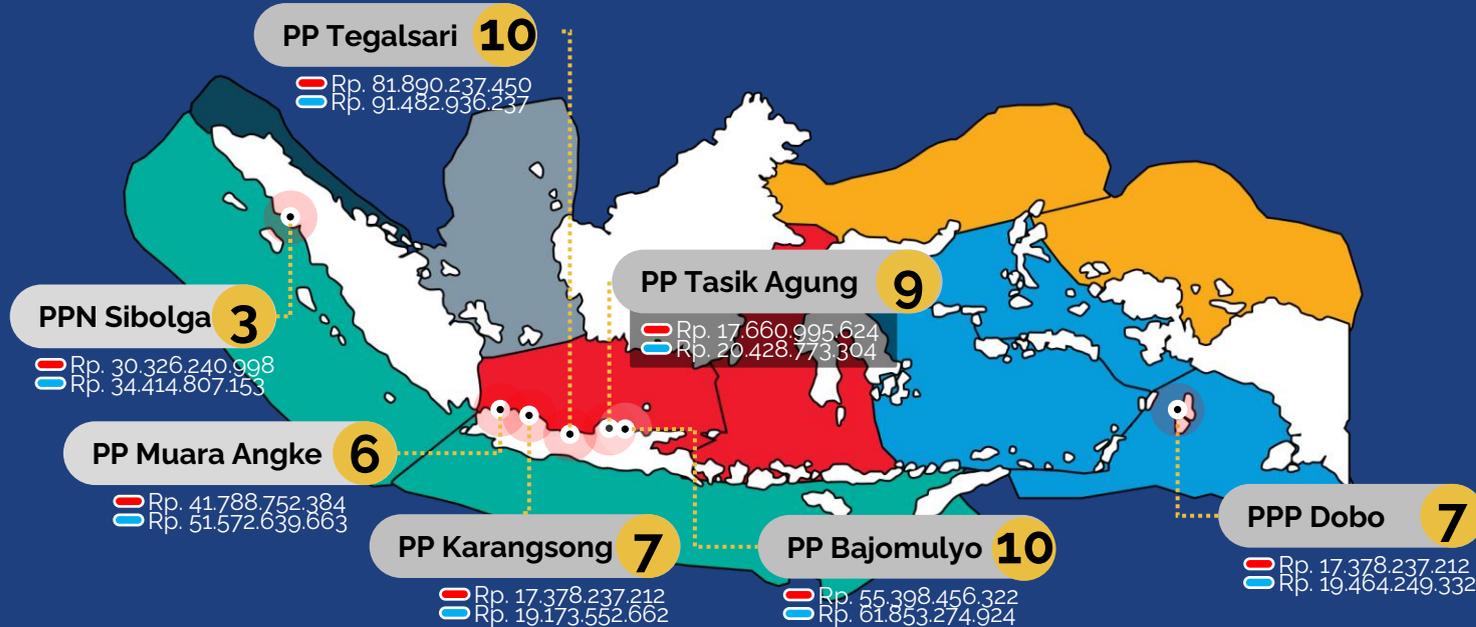
Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Ditjen PSDKP telah membangun Zona Monitoring Center (ZMC) Zona 3 di Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Tual. ZMC ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pemantauan Kapal perikanan dan untuk melacak posisi kapal perikanan secara realtime
- Memastikan kapal mematuhi regulasi perikanan, termasuk zona tangkap yang diizinkan, ukuran kapal, dan perizinan operasional
- Mengidentifikasi kapal yang beroperasi diluar izin / melanggar peraturan perikanan untuk mencegah IUUF
- Membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) jika terjadi kecelakaan / keadaan darurat di laut



## Penguatan Tujuh Pelabuhan Prioritas

Peningkatan penerimaan PNBP setelah penempatan Pengawasan Perikanan sebesar **"Rp. 147 Miliar"**



### Keterangan :

- PNBP SDA sebelum penambahan (12 November 2024)
- PNBP SDA setelah penambahan (16 Desember 2024)

Dalam rangka mengawal program Penangkapan Ikan Terukur, Ditjen PSDKP telah melakukan penguatan pengawasan perikanan di 7 pelabuhan prioritas dengan menerjunkan 52 pengawasan perikanan tambahan. Pengawas perikanan tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- Mendukung pengawasan pada saat keberangkatan dan kedatangan kapal
- Melakukan tracking terhadap kapal yang produksinya masih 0 kg
- Melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal hasil migrasi beserta produksinya
- Melakukan pengawasan terhadap kapal angkut port to port yang berpotensi melakukan alih muat secara illegal di Daerah Penangkapan Ikan

3

## Penanganan Pelanggaran

## Pengenaan Sanksi Administratif

Sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, pendekatan penindakan kini beralih dari pidana menjadi sanksi administrasi yang menjadi solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. Sanksi pidana hanya diterapkan sebagai pilihan terakhir (ultimum remidium) mengingat sifatnya yang keras, kejam, dan dampaknya yang sangat berat bagi setiap individu.

Selain itu, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Total pengenaan sanksi administratif pada tahun 2024 sebanyak 981 dengan 146 di bidang sumber daya kelautan dan 616 dan 835 di bidang sumber daya perikanan.

Sanksi Administratif	SDK	SDP	
		Hasil Operasi	Hasil TL SPKP
SP 1	72	117	585
SP 2	0	0	27
Paksaan Pemerintah	12	25	0
Denda	62	77	4
<b>Jumlah</b>	<b>146</b>	<b>219</b>	<b>616</b>
<b>Total</b>		<b>981</b>	



## Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2024, Ditjen PSDKP menangani 72 kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Sebanyak 42 kasus telah inkrah, 13 kasus dalam penyidikan, 1 kasus P-21, 2 kasus Tahap II, 11 kasus proses sidang, serta 3 kasus masuk Kasasi.



**72**  
Kasus TPKP

**13** Penyidikan

**2** Tahap II

**3** Kasasi

**0** SP-3

**11** Proses Sidang

**0** Peninjauan Kembali

**1** P-21

**0** Banding

**42** Inkrah

## Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



### Tual

Ditjen PSKDP berkolaborasi dengan Polda Maluku mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pendistribusian BBM Solar ke Kapal ikan Asing di Tual, Maluku. Dugaan TPPO dan distribusi BBM solar secara ilegal tersebut mulai terungkap saat Ditjen PSDKP menangkap Kapal Ikan Indonesia pada 12 April 2024 silam di perairan WPPNRI 718. Awal mula terungkapnya kasus dimulai dari adanya alih muatan (transhipment) oleh KII yang juga mendistribusikan solar dan ABK ke kapal ikan asing yang direkrut secara Illegal ke kapal penangkap ikan asing yaitu MV RZ 03 dan MV RZ 05.

MV RZ 03 sendiri telah berhasil diamankan pada tanggal 19 Mei 2024 menggunakan Kapal Pengawas (KP) Paus 01. Dari sekitar 150 ton BBM solar yang akan didistribusikan secara illegal oleh KM MUS kepada kapal penangkap ikan asing tersebut, telah diamankan sekitar 90 ton BBM solar untuk diserahkan kepada Kepolisian sebagai barang bukti. Lebih lanjut, dugaan tindak pidana tersebut bukanlah kewenangan KKP sehingga proses penyelesaiannya dilakukan secara multidoor system dengan aparat penegak hukum yang berwenang, yaitu kepada Bareskrim Polri.



### Kupang

Pada tanggal 7-8 Mei 2024, Hiu Biru 04 kendali Stasiun PSDKP Kupang melakukan patroli di Perairan Teluk Kupang. Sekitar pukul 03.00 WITA tanggal 8 Mei 2024 dilakukan henrikan terhadap Kapal Ikan Tanpa Nama dan ditemukan 12 orang terdiri dari 6 (enam) orang warga negara asing (WNA) asal China dan 6 (enam) orang WNI.

Kapal tanpa nama tersebut kemudian dikawal menuju Pelabuhan Tenau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 WITA, dilaksanakan proses serah terima penanganan dugaan kasus TPPO/ People Smuggling kepada Polda NTT yang disaksikan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Nusa Tenggara Timur.

## Pemanfaatan Kapal Perikanan Hasil Rampasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan menghibahkan 2 (dua) unit kapal perikanan hasil rampasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penyerahan secara simbolik dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Bupati Banyuwangi pada tanggal 30 Maret 2024, sedangkan serah terima dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 di Pelabuhan Perikanan Masami, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Kapal yang diserahkan merupakan hasil tangkapan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP dan disidik oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak. Kapal yang diserahkan yaitu KM. Kalamo Wangi 01 Eks KG 9464 TS kepada KUD Mina Blambangan, Muncar; dan KM. Kalamo Wangi 02 Eks KG 9269 TS kepada Koperasi Pasir Mutiara Selatan, Pancer.



### Pengajuan Permohonan Pemanfaatan 50 Unit Kapal Perikanan Kepada Kejaksaan RI pada kurun waktu 2021-20224

2

Hibah dan Pengalihan Menjadi BMN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

4

Kapal perikanan telah menjadi BMN KKP

1

Proses Penerbitan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan dari Kementerian Keuangan

3

Proses penentuan nilai barang/ taksasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

3

Kapal Perikanan Dalam Proses Hibah

4

Kapal Perikanan berpotensi dimanfaatkan

3

Kapal Perikanan dalam kondisi rusak berat

25

Lelang oleh Kejaksaan RI di daerah

4

Kapal Perikanan telah dimusnahkan

1

Kapal Perikanan diserahkan ke Universitas Hasanuddin

## Public Information Campaign (PIC)

Kegiatan Public Information Campaign (PIC) merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal PSDKP dan Australia Fisheries Management Authority (AFMA) sebagai upaya pencegahan nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin di Perairan Australia dalam wadah Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).



PIC di Kota Kupang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di Masjid Al Hidayah Desa Oesapa. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah 300 peserta, yg terdiri dari Nelayan, Pemilik Kapal dan Keluarga Nelayan. Selain itu, juga mengundang perwakilan dari Dit PWNI Kemlu, Biro Kerja Sama Luar Negeri Setjen KKP, Katimja Kerja Sama Setditjen PSDKP dan Perwakilan Polda NTT serta Forkopimda Provinsi NTT. Sebagai narasumber yaitu dari Ditjen PSDKP, AFMA, Polda NTT, serta DKP Provinsi NTT.

PIC di Rote Ndao dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 di Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Desa Pamela. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah 150 peserta, yg terdiri dari Nelayan, Pemilik Kapal dan Keluarga Nelayan. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan dari Dit PWNI Kemlu, Biro Kerja Sama Luar Negeri Setjen KKP, Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Katimja Kerja Sama Setditjen PSDKP, Katimja Bimbang Gakkum Dit. PP dan Forkopimda Kab. Rote Ndao.



4

## Usulan Kelembagaan PSDKP

# Penataan Organisasi Pusat

## Permen KP No. 5 Tahun 2024

Pada Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 susunan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen PSDKP mengalami perubahan nomenklatur pada tiga unit kerja

1. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
2. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Menjadi

1. Direktorat Pengendalian Operasi Armada
2. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
3. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
4. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Menjadi

## Permen KP No. 2 Tahun 2025

Pada Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 susunan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen PSDKP mengalami penambahan unit kerja yaitu Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan serta perubahan sub direktorat pada empat unit kerja lainnya

1. Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
2. Direktorat Pengendalian Operasi Armada:
  - Subdit Operasi Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli
3. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
  - Subdit Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
  - Subdit Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
  - Subdit Pengawasan Penangkapan Ikan
  - Subdit Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran
  - Subdit Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
  - Subdit Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan
  - Subdit Pengenaan Sanksi Administratif Perikanan

# Usulan Penataan Organisasi UPT

Usulan penataan organisasi UPT mendesain ulang mekanisme kerja yang lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan dengan mempertimbangkan sinkronisasi antara pusat dan daerah, sehingga seluruh aktivitas pengawasan dapat dilakukan secara sinergis tanpa tumpang tindih kewenangan. Dasar usulan penentuan lokasi UPT PSDKP mempertimbangkan kondisi geografis perbatasan wilayah perairan Indonesia dengan negara lain dan tingkat kerawanan terjadinya pelanggaran penangkapan ikan. Namun demikian dalam penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, pada saat pelimpahan berkas P21 ke Kejaksaan, untuk wilayah kerja Kejaksaan berdasarkan provinsi. Perbedaan karakteristik kewenangan geografis kerap memperlambat upaya penegakan hukum.

Setelah melalui serangkaian interviu, *focus group discussion*, dan konsultasi, diperoleh bentuk penataan organisasi UPT PSDKP berupa:

- 1) Pembentukan UPT PSDKP;
- 2) Pengubahan/Peningkatan Eselonisasi UPT PSDKP;
- 3) Penajaman Tugas dan Fungsi UPT PSDKP;
- 4) Perubahan nomenklatur organisasi UPT PSDKP;
- 5) Perubahan Wilayah Kerja

## Usulan Pembentukan PSDKP

1. Pangkalan Pratama PSDKP Kendari
2. Pangkalan Pratama PSDKP Natuna
3. Pangkalan Pratama PSDKP Padang
4. Pangkalan Pratama PSDKP Pati
5. Pangkalan Pratama PSDKP Ternate
6. Pangkalan Pratama PSDKP Kotabaru
7. Pangkalan Pratama PSDKP Merauke

## Usulan Penajaman Tugas dan Fungsi UPT PSDKP (tetap)

1. Pangkalan PSDKP Aceh
2. Pangkalan PSDKP Jakarta
3. Pangkalan PSDKP Bali
4. Pangkalan PSDKP Tual
5. Pangkalan Pratama PSDKP Tahuna

## Usulan Pembentukan PSDKP

1. Pangkalan Utama PSDKP Batam
2. Pangkalan Utama PSDKP Bitung
3. Pangkalan PSDKP Medan
4. Pangkalan PSDKP Cilacap
5. Pangkalan PSDKP Pontianak
6. Pangkalan PSDKP Tarakan
7. Pangkalan PSDKP Kupang
8. Pangkalan PSDKP Ambon
9. Pangkalan PSDKP Biak

### NB\*)

- ✓ Pangkalan Utama PSDKP (Eselon II.b) sejumlah 2 lokasi;
- ✓ Pangkalan PSDKP (Eselon III.a) sejumlah 11 lokasi;
- ✓ Pangkalan Pratama PSDKP (Eselon IV.a) sejumlah 8 lokasi.

# Timeline Penataan Organisasi UPT

## 7 - 26 Desember 2023

Penyusunan dan pembahasan kriteria klasifikasi UPTPSDKP dengan Tim Penataan Kelembagaan PSDKP

## 26 – 28 Februari 2024

*Focus Group Discussion* (FGD) Penataan Organisasi UPT PSDKP, simulasi pengisian kuesioner metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

## Februari – Maret 2025

Pembahasan UPT PSDKP tingkat KKP Pasca Penataan Organisasi Pusat selesai, dan proses Surat MENTERI KP kepada MENTERI PANRB



## 3 - 6 Desember 2023

Pembahasan awal dengan Kemenpan RB dan Tim Penataan Kelembagaan UPT PSDKP

## 27 – 29 Desember 2023

Validasi dan kaji lapang kriteria klasifikasi UPT pada wilayah kerja pengawsan

## Mei - Juni 2024

Finalisasi oleh Pakar terdiri dari Direktur, JF PP Ahli Utama, Kepala UPT PSDKP dan Katimja, serta persetujuan kriteria klasifikasi oleh Biro SDMAO

## 5 Kerja Sama PSDKP

## Kerja Sama Dalam Negeri



Pada tahun 2024 telah disepakati dan ditandatangani 14 dokumen kerja sama bidang Pengawasan SDKP Dalam Negeri, yaitu:

- Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur)
- Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Perjanjian Kerja Sama dengan instansi/lembaga terkait (Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara)
- Perjanjian Kerja Sama dengan institusi pendidikan (Universitas Hang Tuah, Universitas Hasanudin, dan Universitas Cendrawasih)

## Kerja Sama Internasional



### Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF 2024)

- Pelaksanaan pertemuan senior tahunan IAFSF di Jakarta
- Pelaksanaan Public Information Campaign (PIC)
- Finalisasi dan pengesahan IAFSF Joint Statement
- Pertukaran rutin data dan informasi nelayan lintas batas
- Pelaksanaan Patroli Terkoordinasi Jawline-Arafura 2024
- Partisipasi pada pelatihan regional: Training on MCS for Fisheries Enforcement di Surabaya, People Smuggling and Human Trafficking Investigation Skills di Semarang, Maritime Domain Awareness Intermediate and Advance Courses Training di Batam, Frontline Women Leadership di Jakarta, Civil Maritime Security Program di Australia

### Partisipasi Pada Forum Internasional

- *Regional Maritime Workshop : Operationalizing Maritime Cooperative Mechanism to Combat IUUF* pada bulan April 2024 di Vietnam
- *Senior Government Official's Meeting (SGOM) Program ATSEA-2* pada bulan Mei 2024 di Australia
- *4<sup>th</sup> Regional Workshop of AN-IUU* pada bulan Juni 2024 di Thailand
- *Regional Women in Fisheries Workshop* pada bulan Mei 2024 di Thailand
- *The 28<sup>th</sup> Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings* pada bulan Mei 2024 di Thailand
- *Second Workshop on the Development of the IORA Principle Guideline on Combating IUU Fishing* di Perancis, Mei 2024

# Regional Plan of Action to Combat IUUF (RPOA-IUU)



## Sekretariat RPOA-IUU berpartisipasi pada beberapa kegiatan regional:

- *The 16<sup>th</sup> ASEAN Fisheries Consultative Forum (16<sup>th</sup> AFCF) Meeting*
- *The Workshop on the Project End of Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in Southeast Asia*
- *Regional Capacity Building Workshop on Narrating Sustainable Fisheries and IUU Fishing in The Indo Pacific*
- *Regional Industry Forum and Workshop on Market Access Strategies Addressing IUUF, Fair Labor and technology Potential Solution*



## Sekretariat RPOA-IUU bekerja sama dengan stakeholders menyelenggarakan beberapa kegiatan:

- *SOUTH CHINA SEAS FISHERIES GOVERNANCE REGIONAL EXCHANGE (SCS REX)*
- *THE ADVANCED FISHERIES INTELLIGENCE TRAINING*
- *THE 2<sup>nd</sup> DISCUSSION ON DATA SHARING MECHANISM*
- *1<sup>st</sup> RPOA-IUU CONSULTATIVE MEETING*
- *Regional Consultation*
- *The 17<sup>th</sup> RPOA-IUU Coordination Committee Meeting*



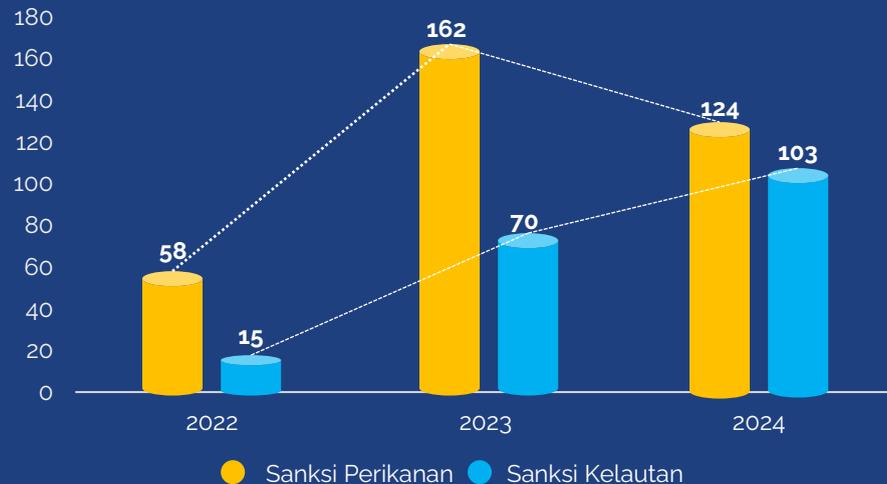
# Keuangan dan PNBP

## Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2024

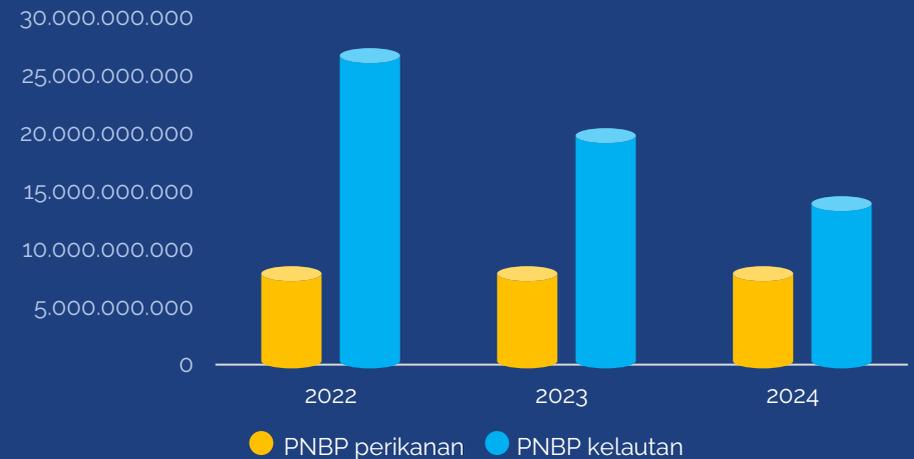
SATKER	PAGU	OUTSTANDING KONTRAK	BLOKIR (AA,PHLN,524)	PAGU EFEKTIF (SETELAH BLOKIR)	REALISASI	% REALISASI	REALISASI SETELAH BLOKIR	REALISASI SETELAH BLOKIR +OK (%)	REALISASI SETELAH BLOKIR+OK+PENGEMBALIAN PNBP
DIREKTORAT POA	445.134.101.000	46.977.701	39.681.809.000	405.452.292.000	362.109.448.940	81,35%	89,31%	89,32%	99,79%
DIREKTORAT PSDK	16.701.293.000	-	4.000.000.000	12.701.293.000	12.693.380.969	76,00%	99,94%	99,94%	99,94%
DIREKTORAT PSDP	11.768.640.000	-	1.700.000.000	10.068.640.000	10.044.230.701	85,35%	99,76%	99,76%	99,76%
DIREKTORAT PP	10.853.500.000	-	1.732.000.000	9.121.500.000	9.106.013.944	83,90%	99,83%	99,83%	99,83%
SET DITJEN. PSDKP	114.486.079.000	-	5.533.543.000	108.952.536.000	108.478.139.589	94,75%	99,56%	99,56%	99,56%
UPT PSDKP	535.624.335.000	30.516.000	23.609.342.000	512.014.993.000	485.812.921.331	90,70%	94,88%	94,89%	99,74%
DEKONSENTRASI	1.600.000.000	-	59.000.000	1.541.000.000	1.504.290.118	94,02%	97,62%	97,62%	97,62%
TUGAS PEMBANTUAN	6.284.168.000	-	121.000.000	6.163.168.000	6.101.174.220	97,09%	98,99%	98,99%	98,99%
<b>TOTAL</b>	<b>1.142.452.116.000</b>	<b>77.493.701</b>	<b>76.436.694.000</b>	<b>1.066.015.422.000</b>	<b>995.849.599.812</b>	<b>87,17%</b>	<b>93,42%</b>	<b>93,43%</b>	<b>99,74%</b>

## Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, melahirkan konsekuensi implementasi sanksi administratif. Pada sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 sanksi administratif dikenakan pada pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan bidang perikanan, dimana denda yang dikenakan masuk menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun 2024 Direktorat Jenderal PSDKP berkontribusi pada PNBP sektor kelautan dan perikanan dari pengenaan 103 sanksi administratif bidang kelautan dan 124 sanksi administratif bidang perikanan. Pelanggaran terbanyak bidang perikanan pada kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia di WPPNRI/laut lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha. Sedangkan untuk pelanggaran bidang kelautan pada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (RTR), Rencana Zonasi (RZ), Kawasan Antar Wilayah (KAW), Rencana Zonasi Kawasan Nasional Strategi Tertentu (RZ KSNT) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut



Tahun	PNBP Kelautan (Rp)	PNBP Perikanan (Rp)	Jumlah (Rp)
2022	26.152.709.206	7.796.846.682	33.949.555.888
2023	19.807.584.247	7.682.756.630	27.490.340.877
2024	13.591.402.719	7.955.617.065	21.547.019.784



Dengan terbitnya sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan, diperoleh PNBP bidang kelautan sebesar Rp13.591.402.719,00 dan PNBP bidang perikanan sebesar Rp7.955.617.065,00 pada tahun 2024. Melihat grafik PNBP Ditjen PSDKP tahun 2022-2024, kurva PNBP perikanan stabil sekitar tujuh miliar setiap tahun sedangkan PNBP bidang kelautan mengalami penurunan. Diindikasikan pada masa awal penerapan sanksi administratif tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang laut masih rendah. Seiring sosialisasi ketentuan periundang-undangan berlaku dan penerapan sanksi administratif, jumlah pelanggaran menurun dan PNBP menyesuaikan.



## PSDKP dalam Prestasi

## Keterbukaan Informasi Publik



Tahun 2024, Ditjen PSDKP Juara I Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan dan Informasi Publik lingkup KKP, penghargaan ini diperoleh berdasarkan beberapa kriteria penilaian monitoring dan evaluasi, pertama kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, sarana prasarana, komitmen organisasi dan digitalisasi. Pada saat yang sama juga diberikan penghargaan ke Pada UPT PSDKP sebagai UPT "Informatif" dalam pelaksanaan Informasi Publik di lingkungan KKP yaitu : Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Benoa Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Pontianak, Pada UPT lingkup Ditjen PSDKP



Tahun 2024, Ditjen PSDKP Juara II Kategori Dokumenter dalam Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari, penghargaan langsung diterima oleh Direktur Jenderal PSDKP, Dr.Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro.

## Adibakti Mina Bahari



Ditjen PSDKP menerima penghargaan pada Forum Silaturahmi dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan kategori Adibakti Mina Bahari Kinerja yang memiliki Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi level I Tahun 2024 di KKP. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PSDKP.

## Fungsi Penegakan Hukum



Pada Kegiatan Rakor Biro Korwas PPNS yang dilaksanakan di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali pada 26-27 September 2024. Ditjen PSDKP melalui Direktur Penanganan Pelanggaran memperoleh Kinerja **Sangat Baik** dalam melaksanakan fungsi Penegakan Hukum dari Bareskrim Polri..

## Penghargaan Kesekretariatan



Ditjen PSDKP pada tahun 2024 dalam Bidang Kesekretariatan telah menerima beberapa penghargaan berupa :

1. Peringkat I Untuk Pengawasan Kearsipan di lingkungan KKP
2. Unit Kerja terbaik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
3. Unit Kerja Terbaik dalam tindak lanjut Hasil Pengawasan
4. Unit Kerja Terbaik dalam Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara



Direktorat Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



ditjenpsdkp



Direktorat Jenderal PSDKP



[kkp.go.id/djpsdkp](http://kkp.go.id/djpsdkp)



ditjenpsdkp



0811-947-141